

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu:

Pertama, Peran Aktif. Dari indikator ini disimpulkan bahwa yang dilakukan peneliti bahwa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa Haumeni Ana untuk merencanakan pembangunan. Selain itu juga dapat dilihat bahwa hubungan pemerintah desa dengan BPD tidak berjalan searah sehingga BPD tidak begitu aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Kedua, Peran Partisipasi. Dari indikator ini disimpulkan bahwa peran partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa BPD tidak konsisten untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Desa yang mana melalui musdus, musdes, dan musrenbangdes BPD dilihat tidak begitu aktif, selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat rendah karena kurangnya informasi mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Ketiga, Peran Pasif. Dari indikator ini BPD Desa Haumeni Ana melakukan musyawarah untuk merencanakan pembangunan melalui Musdes, musdus, musrenbangdes. Namun BPD kurang membangun komunikasi untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa sehingga banyaknya perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Peneliti memiliki saran terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Yaitu:

Pertama, disarankan Kepada Pemerintah Desa Haumeni Ana untuk meningkatkan kerja sama dengan BPD dalam perencanaan pembangunan.

Kedua, disarankan Kepada BPD Desa Haumeni Ana untuk konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa haumeni ana.

Ketiga, disarankan kepada BPD harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat merealisasikan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antlov, Hans. 2000, *Pemerintahan Desa di Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Makalah Konferensi Percik Dinamika Politik Lokal di Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. 2011, *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: UPP STIM –YKPN.
- Cohen, Bruce J. 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Collier, William. 1996, *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesi.
- Conyers, Diana. 1991, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM.
- Diana. 1992, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dodi, Slamet Riyadi. 2002. *Pengembangan Wilayah : Teori dan Konsep Dasar*, Jakarta; Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT.
- Dwiranti, Lilis. 2020. *“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- HAW, Widjaja. 2004, *“Otonomi Desa”* Jakarta: Rajawali.
- Haslinda Zainal,Nining. 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Moekijat, 1998, *Manajemen dan Motivasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mukhtar, Hadisaputra A. 2018, *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kab.Mojokerto: Universitas Airlangga.
- Nawawi, Hadari. 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nurhakiki, Azmi. 2016. *“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Putra, Dani Dirgantara. 2009, *Hubungan Dan Daerah Serta Badan Permsyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Skripri. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rober, Chamber. 1987, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Silalahi, Albert. 1987. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2005, *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparno, Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Pendidikan Tinggi.
- S. Syamsyudin. 2022, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Rpjm*. Yogyakarta: Universitas Proklamasi.

- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W. Arthur Lewis. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Walukow, Christin. 2015, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan*. Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa: Skripsi Universitas Padjadjaran.

Peraturan Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas Dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa.